

KEK

Vol 13 No 2
tahun 2009

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

- **Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Return Saham Properti Pada Bursa Efek Indonesia**
- **Analisis Implementasi Check and Balance System Dalam Pengelolaan Keuangan Negara**
- **Analisis Investasi China ke Indonesia Sebelum dan Sesudah ACFTA**
- **Analysis of The Possibility of Price Level Targeting in Indonesia to Achieve Price Stability : An Alternative to Inflation Targeting**
- **Analisis Efektivitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Departemen Pendidikan Nasional**

ISSN 1410-3249



Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Badan Kebijakan Fiskal
Departemen Keuangan
Republik Indonesia

KAJIAN EKONOMI KEUANGAN

- Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap *Return* Saham Properti Pada Bursa Efek Indonesia
- Analisis Implementasi *Check and Balance System* dalam Pengelolaan Keuangan Negara
- Analisis Investasi China ke Indonesia Sebelum dan Sesudah ACFTA
- *Analysis of The Possibility of Price Level Targeting in Indonesia to Achieve Price Stability: An Alternative to Inflation Targeting*
- Analisis Efektifitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Departemen Pendidikan Nasional

J. Keu & Mon	Vol. 13	No.2	Jakarta 2009	ISSN 1410-3249
--------------	---------	------	--------------	----------------

KATA SAMBUTAN

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kajian Ekonomi dan Keuangan volume ini dapat hadir untuk pembaca sekalian. Edisi ini menyajikan berbagai topik yang beragam dan menarik dalam konteks perkembangan ekonomi dan keuangan. Kami juga melakukan beberapa perubahan pada penerbitan kali ini; perubahan dimaksudkan untuk memperbaiki penambilan jurnal; diantaranya kami lakukan perubahan terhadap ukuran jurnal, *setting* tulisan, dan *column* tulisan.

Kajian pada volume kali ini diisi oleh berbagai topik tulisan yaitu **Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap *Return Saham Properti* Pada Bursa Efek Indonesia; Analisis Implementasi *Check and Balance System* dalam Pengelolaan Keuangan Negara; Analisis Investasi China ke Indonesia Sebelum dan Sesudah ACFTA; *Analysis of The Possibility of Price Level Targeting in Indonesia to Achieve Price Stability: An Alternative to Inflation Targeting*; dan Analisis Efektivitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Departemen Pendidikan Nasional.**

Adapun para penulis yang berkontribusi yaitu R. Nurhidayat; Moh Firdaus Rumbia dan Deny Junanto; Ragimun; Telisa Aulia Falianty dan Eka Budiyaniti; serta Abdul Aziz.

Demikianlah kata pengantar ini yang dapat disampaikan oleh Dewan Redaksi. Ibarat peribahasa tiada gading yang tak retak, maka kami menyadari tulisan ini tentunya masih terdapat kekurangan yang tidak kami sengaja. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dari para pembaca guna perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kami berharap Jurnal ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca. Selamat membaca!

Jakarta, 2009
Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

Cover	
Dewan Redaksi	ii
Kata Sambutan	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Kumpulan Abstraksi	ix
Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap <i>Return Saham Properti</i> Pada Bursa Efek Indonesia	
Oleh: R. Nurhidayat.....	1
Analisis Implementasi <i>Check and Balance System</i> dalam Pengelolaan Keuangan Negara	
Oleh: Moh Firdaus Rumbia dan Deny Junanto.....	15
Analisis Investasi China ke Indonesia Sebelum dan Sesudah ACFTA	
Oleh: Ragimun.....	27
<i>Analysis of The Possibility of Price Level Targeting in Indonesia to Achieve Price Stability: An Alternative to Inflation Targeting</i>	
Oleh: Telisa Aulia Falianty and Eka Budiyanti.....	49
Analisis Efektivitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Departemen Pendidikan Nasional	
Oleh: Abdul Aziz.....	85

DAFTAR TABEL

Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap *Return* Saham Properti Pada Bursa Efek Indonesia

Tabel 1	Hasil Uji ADF	9
Tabel 2	Korelasi Antar Variabel Ekonomi Makro.....	10

Analisis Implementasi *Check and Balance System* dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Tabel 1	Institusi-Institusi yang Terlibat dalam Pengelolaan Keuangan Negara	21
Tabel 2	Implementasi <i>Check and Balance</i> di Australia, Filipina, dan Indonesia	22

Analisis Investasi China ke Indonesia Sebelum dan Sesudah ACFTA

Tabel 1	Perkembangan Kebijakan Perdagangan Indonesia	31
Tabel 2	Perkembangan Realisasi Investasi China ke Indonesia 2001-2007.....	35
Tabel 3	Perbandingan perdagangan Indonesia-Cina terhadap Indonesia-Total Negara (Persen).....	38
Tabel 4	Rata-rata Perdagangan Indonesia Sebelum dan Era ACFTA (US\$)	38
Tabel 5	Perkembangan Realisasi Investasi (proyek) China dan Total Dunia....	39

Analysis of The Possibility of Price Level Targetting in Indonesia to Achieve Price Stability: An Alternative to Inflation Targetting

Table 1	Unit Root Test of Variables	69
---------	-----------------------------------	----

Analisis Efektivitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Departemen Pendidikan Nasional

Tabel 1	Alokasi Pagu Anggaran BOS Tahun Anggaran 2005-2008.....	86
Tabel 2	Memilih Indikator Kinerja <i>Outcome</i> BOS	96
Tabel 3	<i>Paired Sample</i> APK SD.....	98
Tabel 4	<i>Paired Sample</i> APK SMP	99
Tabel 5	<i>Paired Sample</i> APM SD.....	100
Tabel 6	<i>Paired Sample</i> APK SMP	100
Tabel 7	<i>Paired Sample</i> Daftar SD	101
Tabel 8	<i>Paired Sample</i> Daftar SMP	101
Tabel 9	<i>Paired Sample</i> Putus SD.....	102
Tabel 10	<i>Paired Sample</i> Putus SMP	102
Tabel 11	<i>Paired Sample</i> Lulus SD	103
Tabel 12	<i>Paired Sample</i> Lulus SMP.....	103
Tabel 13	<i>Paired Sample</i> Lanjut SD	104
Tabel 14	<i>Paired Sample</i> Lulus SMP.....	104

DAFTAR GAMBAR

Analisis Investasi China ke Indonesia Sebelum dan Sesudah ACFTA

Gambar 1	Teori Diamond	31
Gambar 2	Total Perdagangan Indonesia – China dan Indonesia – Dunia	35
Gambar 3	Ekspor Migas dan Nonmigas ke China (Juta US\$).....	37
Gambar 4	Rata-rata Perdagangan Indonesia Sebelum dan Era ACFTA (US\$)..	38
Gambar 5	Perkembangan Realisasi Investasi (proyek) China dan Total Dunia..	39

Analysis of The Possibility of Price Level Targetting in Indonesia to Achieve Price Stability: An Alternative to Inflation Targetting

Figure 1	Summary of Research Methodology.....	64
Figure 2	Stationary of Inflation Data	69
Figure 3	Non-Stationary of CPI	69

Analisis Efektivitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Departemen Pendidikan Nasional

Gambar 1	Alokasi Bantuan Operasional Sekolah, Bansos Depdiknas dan Depag, Fungsi Pendidikan.....	95
----------	---	----

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

ISSN 1410-3249

Volume 13 Nomor 2 Tahun 2009

Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.

ABSTRAKSI

R. Nurhidayat, et. al. (Departemen Keuangan)

Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap *Return Saham Properti* Pada Bursa Efek Indonesia

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 13 Nomor 2 Tahun 2009, halaman 1-14

Abstract

The purpose of this paper is to provide an analysis of the long-run equilibrium relationships between the four macroeconomic variables and property stock index return of Jakarta Stock Exchange. In addition, a dummy variable is included to capture the impact of crisis. The macroeconomic variables analyzed are interest rate, inflation rate, exchange rate, and market return of Jakarta Stock Exchange using monthly observations from January 2003 through December 2008. Ordinary least square is used to test these relationships. Signal approach is also employed to identify crisis happened during last five years in Indonesia. Econometric result finds long-run equilibrium and significant relationship between Property stock index return and the macroeconomic variables. Finally, there are two crisis periods during last five years in Indonesia. The crises have negative effect on the stock return.

Keywords: Macroeconomic variables, Property, long-run equilibrium, crisis.

Rumbia, Moh Firdaus dan Junanto, Deny, et. al. (Departemen Keuangan, Lembaga Administrasi Negara)

Analisis Implementasi *Check and Balance System* dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 13 Nomor 2 Tahun 2009, halaman 15-26

Abstract

Check and balance system is exceptionally relevant in public finance management. It can assure that every institutions—legislative, executive, and auditive—whose involve in public finance management perform appropriately based on its role and function. This paper analyzes and compares the implementation of check and balances system in public finance management in Australia, Philippines and including Indonesia. The findings are employed to develop the system in Indonesia. Once it has been

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**ISSN 1410-3249****Volume 13 Nomor 2 Tahun 2009*****Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.*****ABSTRAKSI**

implemented, none of the institutions will abuse their power. Consequently the public budget will be more accountable and transparent for the benefit of the people.

Keyword: Check and Balance System, Public Finance Management

Ragimun, et. al. (Departemen Keuangan)**Analisis Investasi China ke Indonesia Sebelum dan Sesudah ACFTA****Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 13 Nomor 2 Tahun 2009, halaman 27-48*****Abstract***

Economic growth of China's stunning last decade to provide a map of this new world economic power. While in some parts of the world is experiencing stagnant growth, but this country is experiencing economic growth is high enough. This means to give new hope for many regions and countries that have economic relations with this country, not the exception of Indonesia. But this is also a concern our country and other countries, such as Asean. Therefore, the ASEAN China Free Trade Area (ACFTA), which is one of the regional agreement, have an important role in bridging the interests of Asean with China's economy, including Indonesia.

For Indonesia, ACFTA has a positive effect because the Chinese clearly requires the supply of raw materials and auxiliary materials for industry, as well as market share and a quite promising partner. However, on the other hand, our country is ready to fight the flood of products from that country. There is no other way that can be adopted to avoid the economy unless they increase the can be obtained that the competitiveness products still need to be improved, especially competitiveness of our products.

By using the SWOT analysis approach, the results through product manufacturing efficiency, while products such as pre-eminent natural resources still can be improved with the increase in value added. From the results of the analysis is also known that after ACFTA the investment of China is still relatively small.

Keyword : pre and post ACFTA, investment, Indonesia's economic strategy

<p>MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISSN 1410-3249 Volume 13 Nomor 2 Tahun 2009</p>
<p><i>Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.</i></p>
<p>ABSTRAKSI</p>
<p>Falianty, Telisa Aulia dan Budiyaniti, Eka, et. al. (Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia) <i>Analysis of The Possibility of Price Level Targetting in Indonesia to Achieve Price Stability: An Alternative to Inflation Targetting</i> Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 13 Nomor 2 Tahun 2009, halaman 49-84</p> <p style="text-align: center;">Abstract</p> <p><i>Price stability is one of the important macroeconomic policy goals. In recent years, price stability has become an important issue for society, especially since oil and global food prices increase continually. This phenomenon motivates this study to know, whether Inflation Targetting (IT) or Price Level Targetting that more appropriate to apply in Indonesia's monetary framework.</i></p> <p><i>IT is ignoring the deviation from past target. The average inflation rate will be convergent to the long term target. Other alternative that has been studied scientifically is price level targeting (PLT). PLT is a policy that has the effect of systematically responding to deviations of the price level from the price level target to preclude long term price level drift.</i></p> <p><i>This study will discuss possibility to apply PLT over IT in Indonesia from welfare gain side. The result from theoretical modeling, generally indicate that PLT is better to apply than IT. But empirical result using Dittmar, Gavin, and Kydland model (1999) shows that IT is better than PLT for Indonesia. It can be seen from rejection of the persistence of the output gap hypothesis in Indonesia during period of study (1983-2008). The result with secondary data also shows that IT has been quite successfully applied consistently. It can be seen by stationary inflation during period of study.</i></p> <p><i>Keywords : Inflation Targetting, Price Level Targetting, Price Stability</i></p>
<p>Aziz, Abdul, et. al. (Departemen Keuangan) Analisis Efektivitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Departemen Pendidikan Nasional Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 13 Nomor 2 Tahun 2009, halaman 85-107</p>

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**ISSN 1410-3249****Volume 13 Nomor 2 Tahun 2009*****Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.*****ABSTRAKSI*****Abstraksi***

Salah satu amanah dari Undang-Undang Keuangan Negara adalah penerapan Sistem penganggaran berbasis yang kinerja berorientasi pada hasil (output based) dari program pemerintah dengan cara meningkatkan efisiensi sumber daya yang terbatas dan efektif dalam pencapaian output dan outcomenya.

Pemerintah perlu melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam mencapai target tersebut (efisien dan efektif) agar terjadi perbaikan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Salah satu metodologi penelitian untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu program/kegiatan dengan cara melakukan uji sampel t berpasangan (paired sample t test) terhadap setiap outcome yang diharapkan dari program BOS ini.

Dari uji statistik dengan tools SPSS ini akan dihasilkan kesimpulan ilmiah setiap variabel outcomenya yaitu apakah dengan adanya program BOS variabel outcome yang diuji (yang terdiri dari variabel APK, APM, Siswa Mendaftar, Putus Sekolah, Lulus Sekolah dan Lanjut Sekolah di tingkat SD dan SMP) mengalami perbedaan yang signifikan (terjadi perbaikan) dengan sebelum pelaksanaan BOS? Atau dengankata lain, apakah BOS efektif memperbaiki variabel-variabel outcome tersebut.

Pada akhirnya, uji statistik ini bisa menjadi model / bahan masukan / pedoman bagi kementerian Negara / lembaga dan kementerian Departemen Keuangan dalam melakukan uji efektivitas program/kegiatan di lingkungannya masing-masing.

Kata Kunci: Penganggaran berbasis kinerja, Uji efektivitas outcome program BOS, Paired sample T Test, Bahan Masukan/Pedoman dalam Uji efektivitas outcome.

ANALISIS IMPLEMENTASI *CHECK AND BALANCE SYSTEM* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Oleh:

Moh Firdaus Rumbia* dan Deny Junanto**

Abstract

Check and balance system is exceptionally relevant in public finance management. It can assure that every institutions—legislative, executive, and auditive—whose involve in public finance management perform appropriately based on its role and function. This paper analyzes and compares the implementation of check and balances system in public finance management in Australia, Philippines and including Indonesia. The findings are employed to develop the system in Indonesia. Once it has been implemented, none of the institutions will abuse their power. Consequently the public budget will be more accountable and transparent for the benefit of the people.

Keyword: Check and Balance System, Public Finance Management

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam konteks kebijakan publik, arah dan kebijakan pemerintah dapat tercermin antara lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di dalam APBN tertuang rencana keuangan pemerintah yang meliputi rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Sektor-sektor yang menjadi fokus pembangunan pemerintah juga dapat dilihat di dalam APBN. Alokasi anggaran serta target penerimaan merupakan hal yang selalu menjadi sorotan publik karena APBN yang telah disetujui selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Menurut siklusnya, ada beberapa tahapan penting yang harus dilalui sebelum APBN ditetapkan menjadi sebuah kebijakan, yaitu tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pada masing-masing tahapan tersebut terjadi interaksi politik di antara beberapa institusi negara yaitu eksekutif, legislatif, dan auditif yang masing-masing memiliki kewenangan untuk menyusun, mengesahkan, dan memeriksa pertanggungjawaban anggaran.

Interaksi politik di antara institusi-institusi negara pada pengelolaan keuangan negara memiliki peranan yang sangat penting untuk menjamin berjalannya *check and balance system*. Mekanisme *check and balance* harus berjalan sesuai aturan main yang berlaku dan dipahami secara proporsional oleh

* Kasubid Program Pengkajian Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Depkeu

** Kasi Pengembangan Widyaiswara, Lembaga Administrasi Negara

masing-masing pihak untuk menghindari terjadinya arogansi suatu institusi terhadap institusi-institusi terkait lainnya yang berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.

Check and balance system dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia, diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Presiden (eksekutif) sebagai kepala pemerintahan, memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya Pasal 20A Perubahan Kedua UUD 1945 menjelaskan bahwa pemerintah baik pusat dan daerah (eksekutif) harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan DPR maupun DPRD (legislatif) atas APBN/APBD yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan nasional maupun daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara juga mempertegas fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (auditif) untuk menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran.

Meskipun mekanisme *check and balance* dalam pengelolaan keuangan negara sudah diatur sedemikian rupa, sejumlah persoalan masih saja muncul ke permukaan. Persoalan tersebut antara lain ialah terhambatnya pelaksanaan anggaran karena proses pengesahan yang memakan waktu lama dan bertele-tele, penggelembungan anggaran, ketidaksesuaian alokasi anggaran dengan prioritas kebutuhan masyarakat, serta konflik kepentingan politik merupakan beberapa persoalan yang seringkali terjadi. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman baik eksekutif maupun legislatif mengenai kekuasaan dan kewenangannya masing-masing dalam kerangka *check and balance*. Padahal kemampuan institusi-institusi tersebut untuk menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Di samping itu persoalan-persoalan lain juga terjadi adalah di lingkungan eksekutif sendiri, misalnya terlambatnya laporan pertanggungjawaban anggaran yang melibatkan BPK sebagai lembaga auditif. Persoalan menjadi semakin beragam apabila kita melihat pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah.

Hal lain yang sejalan dengan upaya mewujudkan *check and balance* dalam pengelolaan keuangan negara adalah munculnya konsep *participatory budgeting* yang memberi peran kepada masyarakat (*civil society*), khususnya dari aspek perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Di Indonesia, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran tampaknya masih terbatas pada formalitas belaka.

Memperhatikan persoalan-persoalan di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis implementasi *check and balance system* di bidang pengelolaan keuangan negara melalui studi komparatif di beberapa negara yaitu Australia, Filipina, dan tentunya Indonesia sendiri. Studi komparatif dipandang perlu dalam rangka *benchmarking* untuk mendapatkan pengalaman terbaik implementasi *check and balance system* dalam pengelolaan keuangan negara di negara-negara tersebut untuk dapat diterapkan di Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan yang akan menjadi sorotan adalah sebagai berikut:

- Institusi-institusi apa saja yang terkait dalam pengelolaan keuangan negara di Australia, Filipina dan Indonesia?
- Bagaimana implementasi *check and balance system* dalam pengelolaan keuangan negara di Australia, Filipina dan Indonesia?

1.3. Landasan Teori

1.3.1. Konsep *Check and Balance System*

Konsep *check and balance* pada prinsipnya adalah konsep politik yang dapat diartikan bahwa masing-masing kekuasaan negara yang menjalankan pemerintahan dapat saling kontrol dan salingimbang. Sebagian pendapat yang menyatakan bahwa konsep *check and balance* yang berlaku hanya di antara tiga cabang kekuasaan yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan argumen yang sudah usang. Bruce Ackerman (Indrayana, 2006) menyatakan bahwa sistem *check and balance* di Amerika Serikat dilakukan tidak lagi di antara tiga cabang kekuasaan tetapi lima yaitu: Presiden, DPR, Senat, MA dan Komisi-komisi Independen. Pendapat ini sudah menjadi *trend* ketatanegaraan modern dimana kehadiran komisi-komisi independen di beri tempat di dalam konstitusi sebagai *constitutional organ*. Bahkan saat ini peranan *civil society* sebagai penyeimbang kekuasaan negara telah menjadi isu penting di sejumlah negara.

Konsep *check and balance* secara implisit telah melekat di dalam pengertian dimana satu pihak saling membatasi dan dibatasi oleh pihak lain, sehingga tidak ada satu kekuasaan atau wewenang yang tidak terbatas. Namun demikian, tidak semua teori tentang "balance" mengasumsikan bahwa kekuasaan harus terbagi secara merata apakah itu terbagi ke dalam tiga kekuatan atau lebih.

Mengenai istilah "check," sejauh ini tidak ada yang dapat membuktikan kapan istilah tersebut digunakan dalam konteks politik. Menurut Nedham seperti dalam studi yang dilakukan oleh Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara LAN (2003), arti sebenarnya dari kata *check* adalah "mencegah suatu tindakan (*preventing*).” Sementara menurut Bolingbroke kata *check* memiliki arti "menguji dan mengendalikan." Sedangkan pengertian lainnya ialah "menyela atau menunda." Dalam pengertian ketiga ini, kata *check* tidak dipasangkan dengan kata "control" namun dengan kata "clog (sumbat)", suatu kata yang secara mendasar diasumsikan bermakna "mengikat" dan dapat pula diartikan sebagai "rintangan".

Berdasarkan beberapa teori mengenai *check and balance* di atas, penulis menyimpulkan suatu rumusan mengenai apa yang dimaksud dengan *check and balance system*, yaitu: "Kemampuan, hak, dan tanggung jawab suatu institusi untuk saling memonitor dan mengawasi institusi-institusi lain, serta membatasi kekuasaan institusi-institusi lain tersebut secara terus menerus agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan."

1.3.2. *Pengelolaan Keuangan Negara*

Pengertian keuangan negara yang dianut di banyak negara pada dasarnya memiliki prinsip-prinsip yang sama meskipun terdapat penyesuaian-penyesuaian dalam beberapa hal. Namun demikian, secara umum keuangan suatu negara tertuang dan diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN berisi tentang proyeksi penerimaan dan pengeluaran negara yang dilakukan pemerintah dalam suatu kurun waktu tertentu (satu tahun). UU 17/2003 tentang Keuangan Negara juga menyebutkan bahwa wujud dari keuangan negara adalah APBN/APBD. APBN sendiri memiliki siklus anggaran yang terdiri dari: (1) penyusunan dan pembahasan anggaran; (2) penetapan anggaran; (3) pelaksanaan anggaran; (4) pertanggungjawaban anggaran.

Meskipun eksekutor pelaksanaan anggaran adalah kepala pemerintahan suatu negara, namun tersusunnya suatu anggaran negara merupakan hasil dari konsensus politik antara lembaga-lembaga terkait (eksekutif, legislatif, dan auditif) yang digunakan sebagai pedoman dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa. Anggaran negara juga merupakan cermin dari kebijakan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan.

Sejalan dengan konsep tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah suatu proses interaksi politik antara lembaga-lembaga negara terkait untuk menyusun dan membahas anggaran, menetapkan anggaran, melaksanakan anggaran dan mempertanggungjawabkan anggaran.

1.4. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- Mendeskripsikan institusi-institusi terkait dalam pengelolaan keuangan negara dan mengkomparasikan implementasi *check and balance system* di Australia, Filipina, dan Indonesia.
- Merekomendasikan pengembangan *check and balance system* di bidang pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

2. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur terhadap buku-buku, hasil penelitian, maupun referensi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya data akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Sampel penelitian adalah Australia sebagai representasi negara maju, Filipina sebagai representasi negara berkembang, dan Indonesia sendiri.

3. **Hasil dan Pembahasan**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini akan menganalisis implementasi *check and balance* dalam pengelolaan keuangan negara, maka bagian ini akan mendeskripsikan institusi-institusi yang terkait dan

mekanisme *check and balance* dalam pengelolaan keuangan negara di Australia, Filipina dan Indonesia.

3.1. Institusi-Institusi yang Terkait dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan, diketahui bahwa keuangan negara baik di Australia, Filipina maupun Indonesia tidak dikelola oleh satu institusi negara. Di negara-negara tersebut, terdapat lebih dari satu institusi yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menyusun, mengesahkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran negara. Hal ini dapat dipahami bahwa setiap negara berupaya menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atas keuangan negara dengan hanya menyerahkan pengelolaannya kepada satu institusi saja.

Institusi-institusi yang terlibat dalam manajemen keuangan publik di Australia adalah: Parlemen, Pemerintah (*Commonwealth*), Instansi-Instansi Pusat (*Department of Finance and Administration, Department of Treasury*), Badan-Badan yang didanai Anggaran Negara dan *Australian National Audit Office (ANAO)*. Parlemen memiliki peran dan tanggung jawab dalam menentukan 'pergerakan' uang *Commonwealth* (Pemerintah Federal). Hal ini dilakukan sebagai pelaksanaan amanat tanggung jawab konstitusional. Pada prakteknya, pengalokasian anggaran harus melalui pembahasan di *House of Representative* terlebih dahulu sebelum di proses oleh parlemen. Selanjutnya peran dan tanggung jawab Pemerintah ialah mengajukan usulan anggaran dan mengelola pendapatan. Peran dan tanggung jawab dari instansi-instansi pusat adalah memberikan masukan-masukan mengenai kebijakan dan strategi finansial. Dalam kaitan ini, instansi yang berperan adalah *Department of Finance & Administration (DOFA)* dan *Department of Treasury (DOT)*. Kemudian peran dari Badan-Badan yang didanai Anggaran Negara ialah memberi masukan kepada menteri tentang kebijakan dan anggaran bagi institusi pemerintah. Badan ini juga bertanggung jawab atas implementasi program. Terakhir, ANAO merupakan lembaga audit independen yang bertugas melakukan audit terhadap pertanggungjawaban anggaran pemerintah.

Sementara itu di Filipina, institusi-institusi yang terkait dalam pengelolaan keuangan negara adalah Kongres/Parlemen, *National Economic Development Agency (NEDA)*, *Department of Finance (DOF)*, *Department of Budget and Management (DBM)*, *Development and Budget Coordination Committee (DBCC)*, *Commission on Audit (COA)*, dan *Civil Society*. Peranan Kongres/Parlemen terhadap anggaran yang diajukan pemerintah adalah melakukan pengecekan dan pengesahan. NEDA berperan dalam dalam memonitor secara periodik program-program dan proyek-proyek besar untuk memastikan kesesuaiannya dengan *Medium-Term Philippines Development Plan (MTPDP)* dan *Medium-Term Public Investment Plan (MTPIP)*. DOF memiliki tugas dan kewenangan dalam memonitor penerimaan negara serta mengatur pinjaman yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah agar kebutuhan pendanaan sesuai dengan kebutuhan untuk memfasilitasi program-program. Sementara DBM bertanggung jawab dalam menerima pengajuan proposal anggaran dari instansi-instansi pemerintah, meninjau proposal tersebut dan menggabungkannya menjadi proposal anggaran Presiden yang kemudian diajukan ke Kongres. Selain itu, DBM juga memberikan mandat kepada semua instansi pemerintah untuk menyerahkan laporan pekerjaan masing-masing serta memonitor realisasi anggaran melalui laporan kemajuan

masing-masing lembaga. DBCC merupakan wadah yang digunakan oleh DBM untuk mengkoordinasikan beberapa lembaga termasuk NEDA dan DOF dalam mengelola berbagai aktivitas penganggaran. Selanjutnya COA merupakan instansi yang melakukan audit keuangan tahunan pada semua instansi dan instrumen pemerintah baik pada tingkat nasional maupun daerah. Sedangkan *Civil Society* dilibatkan dalam *participatory audit* oleh COA.

Kemudian, institusi-institusi yang terlibat dalam pengelolaan anggaran negara di Indonesia teridentifikasi sebagai berikut yaitu: Presiden, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Departemen Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan pada level Pemerintah Daerah, terdapat institusi-institusi yang pada prinsipnya memiliki tugas, fungsi dan kewenangan yang sama dengan institusi-institusi Pusat. Sesuai pasal 6 ayat 1 UU 17/2003, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya kekuasaan Presiden tersebut dikuasakan kepada: Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Namun demikian kekuasaan tersebut tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang. Departemen Keuangan merupakan institusi yang berwenang dalam menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN; mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang; melaksanakan fungsi bendahara umum negara; menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; dan melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Menteri) memiliki tugas untuk menyiapkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJP Nasional. Lebih lanjut, DPR melalui Panitia Anggaran bertugas untuk melakukan review atas RAPBN yang diusulkan oleh pemerintah. Sedangkan BPK memiliki tugas untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan standar pemeriksaan.

Untuk memberikan gambaran utuh mengenai institusi-institusi yang terlibat dalam pengelolaan keuangan publik di masing-masing negara, tabel berikut ini menjelaskan keterlibatan masing-masing institusi dalam setiap tahapan siklus anggaran.

Tabel 1.

Institusi-Institusi yang Terlibat dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Siklus Anggaran	Australia	Filipina	Indonesia
Penyusunan/ Perencanaan	Parlemen, DOFA & DOT	DOF, DBM, DBCC,	Depkeu, BAPPENAS
Pembahasan/ Pengesahan	Parlemen	Kongres/Parlemen	DPR
Pelaksanaan	Pemerintah, Badan-Badan yg Didanai Anggaran Negara	Pemerintah, NEDA	Pemerintah
Pertanggungjawaban	ANAO	COA	BPK

Diolah dari berbagai sumber

3.2. Check and Balance dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Implementasi *check and balance* di masing-masing negara tentunya mengalami sejumlah perbedaan yang antara lain dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang dianut negara tersebut. Perbedaan-perbedaan implementasi *check and balance* dalam pengelolaan keuangan negara di Australia, Filipina, dan Indonesia, dapat dilihat dalam Tabel 2.

Dari tabel tersebut, tampak bahwa pengelolaan keuangan negara di setiap negara merupakan suatu proses politik yang kompleks serta melibatkan sejumlah institusi baik legislatif, eksekutif maupun auditif. Dimana masing-masing institusi memiliki peran dan wewenangnya masing-masing. Namun demikian, aturan main yang telah diatur tersebut dapat berbeda pada tahap pelaksanaannya.

Perbedaan implementasi *check and balance* di setiap negara salah satunya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara tersebut. Sebagai contoh, Australia merupakan suatu negara dengan sistem pemerintahan parlementer memiliki implikasi yang berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem presidensiil seperti Indonesia dan Filipina. Perbedaan yang paling menonjol dalam sistem parlementer adalah kepala pemerintahan (eksekutif) yaitu Perdana Menteri juga merupakan anggota parlemen (legislatif). Sementara pada sistem presidensiil, kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden sedangkan DPR memiliki kekuasaan legislatif, yaitu pembuat undang-undang, pengawasan, dan penganggaran.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan sistem *check and balance* dalam pengelolaan keuangan negara di Australia tidak terlihat secara eksplisit melainkan melekat dalam sistem yang telah mapan jika dibandingkan dengan Filipina maupun Indonesia. Namun demikian, bukan berarti di Australia tidak terjadi *check and balance*. Praktek *check and balance* tersebut bahkan dilakukan melalui beberapa tahapan, sama halnya dengan Filipina dan Indonesia. *Check and balance* di Australia dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan Filipina dan Indonesia.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem *check and balance* adalah: kelembagaan, kebijakan, dan keterlibatan masyarakat (*civil society*).

Tabel 2.
Implementasi Check and Balance di Australia, Filipina, dan Indonesia

Negara	Check			Balance		
	Institusi		Hal-hal yang di-check	Institusi		Hal-hal yang di-balance
	Subyek	Obyek		Subyek	Obyek	
Australia	DOFA	Line Ministries and Agencies	Budget Proposals	SMR	Line Ministries and Agencies	PBS, MTEF
	Prime Minister	Line Ministries and Agencies	PBS	ERC	Line Ministries and Agencies	Budget Cabinet
	Parliament	Government	Budget Cabinet, PBS	Parliament	Treasure	Budget Cabinet, PBS
	ANAO	Government	Budget implementation	ANAO	Government	Institution's and Agencies' budget
	Ombudsman	Government	Government performance			
Filipina	Parliament Multilateral donors	Government	One year budgeting framework	DBM, NEDA	Line ministries and agencies	Medium Term Expenditure Framework (MTEF)
	DBM	Line Ministries and Agencies	Fiscal discipline, allocation efficiency and operational efficiency	Parliament	Government	Budget Proposal & Performance
	DBM	Line Ministries and Agencies	Performance output and outcomes	-	-	-
	COA	Government	Budget implementation	-	-	-
Indonesia	Depkeu	Kementerian dan Lembaga	Usulan anggaran	Depkeu	Kementerian dan Lembaga	Konsistensi Rencana Kerja Anggaran-Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) dengan Prioritas Anggaran
	Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian dan Lembaga	RKA-KL	Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian dan lembaga	Konsistensi RKA-KL dengan Rencana Kerja Pemerintah
	DPR	Pemerintah	Usulan RAPBN	DPR	Pemerintah	APBN
	BPK	Pemerintah	Laporan Keuangan Pelaksanaan APBN	Presiden/Pemerintah	DPR	Pengeluaran Pemerintah apabila APBN tidak disetujui

Diolah dari berbagai sumber

Kelembagaan institusi-institusi yang mengelola keuangan negara di Australia jauh lebih mapan dalam hal kapasitas dan profesionalitas daripada dua negara lainnya. Sebagai contoh, Parlemen Australia di dalam proses pembahasan dan pengesahan anggaran mendapatkan masukan-masukan berupa hasil-hasil penelitian yang dilakukan *Department of Parliamentary Library* secara berkala. Sehingga anggota parlemen (legislatif) memiliki kapasitas yang memadai dalam membahas alokasi anggaran sesuai dengan prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Kondisi ini relatif tidak ditemui di Filipina maupun Indonesia. Anggota badan legislatif kurang memahami persoalan dan kebutuhan sehingga pembahasan anggaran yang diusulkan pemerintah (eksekutif) memakan waktu panjang. Hal lain terkait dengan kelembagaan adalah profesionalisme institusi yang mengusulkan anggaran. Kenyataan yang terjadi di Filipina dan Indonesia adalah kecenderungan eksekutif untuk menggelembungkan anggaran yang diusulkan tanpa memperhatikan kinerja dan prioritas kebutuhan. Hal ini diperburuk dengan tingginya konflik kepentingan di institusi legislatif karena anggota legislatif cenderung memaksakan agenda politiknya masing-masing. Bahkan di Filipina, independensi institusi eksekutif dalam hal perencanaan dan penganggaran sangat rendah mengingat adanya tekanan dan campur tangan dari negara-negara donor terhadap rancangan anggaran penerimaan dan belanja negaranya. Namun demikian, keberadaan lembaga auditif yang independen dan obyektif mampu menyeimbangkan kekuasaan eksekutif dalam pelaksanaan anggaran. Bahkan di Australia, hasil evaluasi yang dilakukan lembaga *ombudsman* memiliki pengaruh terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh pemerintah.

Selanjutnya isu kebijakan juga mempengaruhi berjalannya *check and balance system*. Pemahaman seluruh institusi terkait terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan negara merupakan hal yang sangat penting. Perbedaan persepsi masing-masing institusi atas sebuah peraturan akan berdampak pada arogansi kekuasaan suatu institusi terhadap institusi lainnya. Contohnya, sikap anggota DPR pada era reformasi di Indonesia yang berlebihan dalam mengkritisi pemerintah menyebabkan tidak efektifnya implementasi suatu kebijakan yang pada dasarnya sudah mendapat persetujuan legislatif.

Masih terkait dengan masalah kebijakan, adanya mosi tidak percaya atau *impeachment*, menjadikan lembaga legislatif di Australia dan Filipina cukup efektif dalam membatasi kekuasaan eksekutif atas pengelolaan anggaran publik. Pelaksanaan anggaran yang menyimpang dari kesepakatan yang telah dibuat dapat berakibat pada jatuhnya sebuah pemerintahan atau dikurangnya alokasi anggaran di masa mendatang. Mekanisme *reward and punishment* dalam pengelolaan anggaran negara seperti yang diterapkan Filipina merupakan contoh yang dapat diterapkan di negara lain seperti Indonesia. Di Filipina, pernah terjadi salah satu lembaga pemerintah menunjukkan kinerja buruk yang tercermin dengan semakin maraknya masalah penyelundupan yang seharusnya ditangani oleh lembaga tersebut. Sebagai reaksi atas buruknya kinerja tersebut, Kongres memvonis lembaga tersebut dengan hanya memberikan persetujuan anggaran sebesar 1 peso untuk tahun berikutnya (*one peso punishment*). Hal ini tidak berlaku di Indonesia, karena meskipun kinerja suatu lembaga pemerintah sangat buruk, legislatif tetap menyetujui usulan anggaran yang diajukan oleh lembaga tersebut dan bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Faktor terakhir yang ikut mempengaruhi *check and balance system* adalah keterlibatan masyarakat (*civil society*). *Civil Society Organization* (CSO) di Australia ikut berperan sejak tahap awal proses perencanaan anggaran hingga evaluasi. Pemerintah Australia sangat terbuka terhadap masukan-masukan yang diberikan oleh CSO, khususnya yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik, isu-isu lingkungan hidup dan *ageing society*. Sedangkan di Filipina, CSO dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaan anggaran oleh *Commission on Audit* (COA). Akan tetapi peranannya dalam *check and balance* anggaran masih rendah. Kelompok ini mungkin cukup efektif dalam penggantian rezim melalui *people power*. Namun, berjalannya suatu organisasi pemerintahan yang baik tidak dapat secara terus menerus dalam situasi pergantian rejim melalui pengerahan massa. Kelompok ini juga cenderung tidak dapat mempengaruhi kongres dan berskala kecil. Pengaruh terbesar dalam kongres justru berasal dari partai mayoritas. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran di Indonesia pada dasarnya sudah difasilitasi dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana peran serta masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sangat dibutuhkan untuk ikut menentukan arah pembangunan yang akan dijalankan pemerintah. Musrenbang sendiri terdiri dari beberapa level yaitu mulai dari tingkat desa hingga nasional. Rumusan yang dihasilkan dari Musrenbang tersebut kemudian dijadikan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Panjang maupun Menengah. Namun demikian, keterlibatan masyarakat tampaknya masih sebatas formalitas. Di tingkat daerah, seringkali aspirasi yang telah disampaikan masyarakat (CSO) tidak terakomodir dalam pembahasan dan penyusunan anggaran oleh insitusi eksekutif dan legislatif. Bahkan yang lebih memprihatinkan, seringkali keterwakilan masyarakat di dalam Musrenbang tidak representatif karena hanya diwakili oleh pejabat-pejabat struktural daerah seperti Kepala Desa, Lurah, atau pun Camat.

Terkait dengan keterlibatan masyarakat, konsep *participatory budgeting* seperti yang ada di Brazil pada dasarnya merupakan bentuk partisipasi utuh dari masyarakat. Dalam konsep ini, seperti yang dinyatakan oleh Brian Wampler (2007), masyarakat ditempatkan bukan sebagai obyek dari pembangunan melainkan aktor dari pembangunan itu sendiri. Terkait dengan *check and balance system*, program penganggaran partisipatif merupakan suatu inovasi-kreatif dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan. Masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pembuatan kebijakan melalui berbagai forum pertemuan dengan pemerintah dan diselenggarakan dalam waktu setahun. Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menetapkan alokasi sumber daya yang ada, membuat prioritas kebijakan sosial dan memantau pengeluaran anggaran publik. Program-program ini didesain sedemikian rupa dengan melibatkan warga negara dalam proses pembuatan kebijakan, mendorong reformasi administrasi dan mendistribusikan sumber daya publik kepada masyarakat di daerah yang berpenghasilan rendah.

Dari pengalaman di Brazil, masyarakat yang berpenghasilan rendah dan secara politik tradisional berada di luar sistem kurang mendapatkan perhatian dan keberpihakan dalam hal anggaran publik. Oleh karena itu, penganggaran partisipatif memberikan peluang kepada mereka untuk terlibat dalam membuat kebijakan. Program ini bertujuan untuk: (i) memajukan pembelajaran publik dan kewarganegaraan aktif; (ii) mendapatkan keadilan sosial melalui perbaikan dalam

kebijakan dan alokasi sumber daya; dan (iii) mereformasi aparat administrasi. Melalui program ini, kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan dapat tersalurkan dengan baik, dan pembangunan akan lebih tepat sasaran karena pada kenyataannya masyarakatlah yang paling mengerti apa yang menjadi kebutuhan mereka. Di samping itu, akuntabilitas anggaran akan lebih terjamin karena masyarakat juga yang melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Konsep penganggaran partisipatif di atas penting untuk diungkapkan, karena Indonesia sebagai negara demokrasi yang mengedepankan kepentingan publik kiranya perlu mengadopsi konsep tersebut. Namun demikian, tentu saja perlu pengkajian dan persiapan lebih jauh sebelum penganggaran partisipatif dapat diimplementasikan.

4. Kesimpulan

Pengelolaan keuangan negara adalah hal yang sangat krusial karena apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh institusi-institusi yang terlibat didalamnya akan memiliki dampak negatif yang luar biasa terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik secara umum. *Check and balance system* menjamin akuntabilitas, transparansi dari pengelolaan anggaran publik.

Secara empirik, Australia merupakan negara yang telah menerapkan *check and balance system* secara baik khususnya dalam pengelolaan keuangan negara sehingga anggaran publik dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan secara baik dan profesional. Sementara itu, implementasi *check and balance* di Filipina masih belum dapat menyamai Australia. Namun demikian, mekanisme "*balance*" di Filipina seperti pemberlakuan *reward and punishment system* dan prosedur *impeachment*, terbukti efektif menyeimbangkan kekuasaan pemerintah terhadap penggunaan anggaran. Sedangkan di Indonesia, meskipun secara empiris *check and balance* sudah diatur dan dilakukan, namun masih terdapat beberapa persoalan harus diatasi (khususnya di daerah) yang terkait dengan kelembagaan, kebijakan dan keterlibatan masyarakat.

5. Rekomendasi

Setelah melakukan *benchmarking* mengenai penerapan *check and balance system* dalam pengelolaan keuangan negara di Australia, Filipina, dan Indonesia sendiri, terdapat beberapa *lesson learned* yang dapat direkomendasikan untuk mengembangkan *check and balance system* di Indonesia khususnya dalam hal pengelolaan anggaran negara, yaitu sebagai berikut:

- Perlunya meningkatkan pemahaman legislasi anggaran bagi anggota legislatif (*capacity building*).
- Perlunya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan, termasuk melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat hingga daerah.
- Perlunya menerapkan mekanisme *reward and punishment* dalam pengelolaan keuangan negara untuk menjaga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- Perlunya meningkatkan peranan pengawasan lembaga-lembaga pemerintah (ekstra struktural) maupun non pemerintah (*civil society*).

Analisis Implementasi(Moh Firdaus R. & Deny Junanto)

- Perlunya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran publik dengan mengadopsi konsep *participatory budgeting*.
- Perlunya meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam pengolahan dan pencatatan data keuangan (khususnya di daerah), sehingga kesalahan dan keterlambatan pelaporan keuangan dapat diminimalisir.

Daftar Pustaka

- Aralar, Reynaldo B. 2004. *Separation of Power and Impeachment*. National Bookstore. Mandaluyong City.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Kekuasaan dalam UUD 1945*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Hawke, Lewis. 2006. *Australia's Financial Management Framework*. Department of Finance and Administration, Australia
- , 2006. *Managing Financial Management Reform: Australia's Experience*. Department of Finance and Administration, Australia
- J. Denny Indrayana. 2006. "Komisi Negara Independen Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan," paper pada Seminar STIA LAN Eksistensi Lembaga Independen dalam Konfigurasi Kelembagaan Negara untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Efektif dan Efisien, Jakarta 14 November 2006
- Lembaga Administrasi Negara Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara. 2003. *Laporan Kajian Kebijakan tentang Check and Balance System dalam Penyelenggaraan Negara*. Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2006. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. LAN. Jakarta.
- Wampler, Brian. 2007. *Sebuah Panduan: Penganggaran Partisipatif*. <http://www.internationalbudget.org/themes/PB/GuidePBIndonesian.pdf>. Diakses tanggal 30 September 2007

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah